



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

**BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU
UJUNG BATEE - ACEH**

**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2021**



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

JALAN LAKSAMANA MALAHAYATI KM. 16 UJUNG BATEE, BANDACEH, KODE POS 23381
TELEPON : 08116811448 SURAT ELEKTRONIK : tu.bbapub@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

Nomor : 39/BPBAP.UB/RC.221/SK/II/2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS RENCANA STRATEGIS BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR
PAYAU UJUNG BATEE TAHUN 2020 – 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMENKP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 dan Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, perlu ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee tentang Rencana Strategis Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran negara Nomor 4405);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699);

8. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor __/PER-DJPB/2020 tentang Perubahan atas Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Perubahan Kedua Rencana Strategis Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee Tahun 2020-2024 (Lampiran);
- Kedua** : Perubahan Kedua Rencana Strategis Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga** : Perubahan Kedua Perubahan Kedua Rencana Strategis Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama digunakan sebagai acuan bagi Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee dalam perencanaan tahunan dan penyelenggaraan program pembangunan perikanan budidaya;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan;
- Kelima** : Akan dilakukan revisi atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Aceh Besar
Pada tanggal 6 Januari 2021
Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau
Ujung Batee



M. TAHANG

LAMPIRAN :

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE
Nomor : 39/BPBAP.UB/RC.221/SK/I/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS RENCANA STRATEGIS BALAI PERIKANAN
BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE TAHUN 2020-2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur diucapkan kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya, yang telah memberikan kepada bangsa Indonesia suatu sumberdaya perikanan budidaya yang sangat besar. Harus disyukuri karunia tersebut dengan cara memanfaatkannya secara bijak demi kesejahteraan masyarakat serta senantiasa menjaga kelestariannya.

RENSTRA 2020 – 2024, disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis baik lokal maupun global, serta hasil capaian pembangunan perikanan budidaya sebelumnya. Hal ini diperlukan agar langkah-langkah terobosan yang diambil sebagai bahan kebijakan, dapat berkesinambungan dan memperkuat kebijakan sebelumnya yang dirasa masih lemah. RENSTRA ini berisi visi, misi, arah kebijakan, target dan sasaran pembangunan perikanan budidaya dalam kurun waktu 2020 – 2024, sebagai bahan acuan dalam perumusan dan sebagai “benang merah” sinergitas kegiatan antar pusat, daerah maupun masyarakat. Disadari bahwa keberhasilan pembangunan perikanan budidaya, tidak akan tercapai tanpa dukungan dan peran serta berbagai pihak. Oleh karena itu sangat diperlukan sinergitas, integrasi dan koordinasi yang baik dalam implementasi pembangunan perikanan budidaya di lapangan.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, yang telah memberikan koreksi, saran dan masukan yang konstruktif untuk kesempurnaan RENSTRA ini. Semoga pembangunan perikanan budidaya dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Ujung Batee, 6 Januari 2021
Kepala Balai Perikanan Budidaya
Air Payau Ujung Batee



M. Fahang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan.....	3
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	8
A. Visi dan Misi	8
B. Tujuan	8
C. Sasaran Strategis	8
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	10
A. Arah kebijakan dan Strategi Pembangunan Perikanan Budidaya.....	10
B. Arah Kebijakan dan Strategi BPBAP Ujung Batee	12
C. Kerangka Regulasi.....	15
D. Kerangka Kelembagaan	16
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	22
A. Target Kinerja.....	22
B. Kerangka Pendanaan	24
BAB V. PENUTUP	25
A. Kesimpulan	25
B. Monev dan Pelaporan	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Pembangunan perikanan budidaya tahun 2020-2024 pada Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee (selanjutnya disebut BPBAP Ujung Batee) dilaksanakan dalam rangka mewujudkan peningkatan produksi perikanan budidaya berkelanjutan dengan program sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan;
2. Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan
3. Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan;
4. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya;
5. Pengawasan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya.

BPBAP Ujung Batee dalam program pembangunan perikanan budidaya periode 2010-2014 dalam pelaksanaannya mengacu pada indikator kinerja yang harus dicapai. Pencapaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

1. Produksi perikanan budidaya tahun 2010-2014 meningkat dengan kenaikan rata-rata tiap tahun mencapai 23,8%. Pada tahun 2010 produksi perikanan budidaya sebesar 6,27 juta ton. Sedangkan pada tahun 2014 naik mencapai 14,52 juta ton yang terdiri dari: rumput laut 10,23 juta ton; ikan 3,69 juta ton dan udang 0,59 juta ton.
2. Adapun nilai produksi sementara pada tahun 2014 sebesar Rp. 109,78 triliun. Atas pencapaian produksi perikanan budidaya tersebut, *Food Agriculture Organization* (FAO) menempatkan Indonesia sebagai penghasil produksi perikanan budidaya terbesar ke-2 setelah negara Tiongkok.
3. Jumlah teknologi inovatif budidaya hasil perekayasa bidang air payau tahun 2014 sebanyak 5 paket teknologi, yaitu 1) Teknologi pentokolan secara insitu di kawasan cluster budidaya; 2) Produksi benih nila salin sistem jar/corong; 3) Produksi benih udang pisang; 4) Biofloc pada pembesaran nila salin; dan 5) Teknologi produksi massal *Daphnia* sebagai pakan starter.
4. RSNi yang diusulkan pada tahun 2014 ke Panitia Teknis SNI Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya berjumlah 6 judul yaitu 1) Produksi nener bandeng *chanos-chanos* dengan sistem outdoor; 2) Produksi Massal *Nannochloropsis Sp*; 3) Produksi Massal Rotifera (*Brachionus Sp*); 4) Modifikasi teknik pengenceran metode ALT pada SNI 01-2332.3-2006; 5) Alat panen tokolan udang windu; dan 6) Pembenihan Udang Pisang (*Penaeus Spp*).
5. Jumlah bahan kebijakan teknis perikanan budidaya air payau berupa bahan referensi berbentuk petunjuk teknis ataupun prosedur operasional standar yang dikeluarkan oleh BPBAP Ujung Batee untuk dapat diterapkan dan menjadi acuan bagi para pembudidaya. Adapun hasil kebijakan teknis berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dihasilkan BPBAP Ujung Batee tahun

2014 yaitu 1) Produksi benih nila salin sistem jar/corong; 2) Produksi benih udang pisang; dan 3) Teknologi produksi massal Daphnia sebagai pakan starter.

6. Perkembangan penambahan jumlah lokasi diseminasi sangat besar bila dibandingkan tahun 2013 yang hanya tercapai lokasi diseminasi 6 lokasi, bertambah menjadi 41 lokasi diseminasi ditahun 2014 atau ada sekitar 683,33 % dari tahun 2013.
7. Jumlah kawasan budidaya binaan BPBAP Ujung Batee yang dicapai pada tahun 2014 berjumlah 14 kawasan budidaya. Capaian jumlah kawasan binaan ini melampaui jumlah kawasan binaan yang ditargetkan sebelumnya sebanyak 6 kawasan budidaya pada tahun 2014. Jadi dari segi peningkatan jumlah kawasan binaan, realisasi mencapai 233,33% dari target.
8. Jumlah tenaga teknis binaan pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 250 orang. Sampai akhir Desember 2014 yang terealisasi berjumlah 445 orang, sedangkan pada tahun 2013 hanya tercapai 284 orang.
9. Luas lahan yang difasilitasi sesuai target produksi perikanan budidaya berupa sarana, prasarana serta biaya operasional kegiatan budidaya pada tahun 2014 hanya seluas 2 ha. Begitu juga pada tahun 2013 capaian luasan lahan yang difasilitasi yaitu 2 ha. Luasan lahan ini terdiri dari 6 petak tambak beton ukuran masing-masing berukuran 3.000 m² (18.000 m²), dan saluran pendukung dengan luasan total 2.000 m², sehingga berjumlah total 20.000 m² (2 ha).
10. Pada tahun 2014 ini target jumlah induk/calon induk komoditas air payau BPBAP Ujung Batee yaitu berjumlah 10.000 ekor dengan realisasi mencapai 18.219 ekor. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, capaian realisasi tahun 2014 mengalami peningkatan capaian realisasi. Di mana pada tahun 2013 persentase capaian hanya sebesar 107,3% sementara tahun 2014 mencapai 182,19%. Padahal target pada tahun 2014 sebesar 10.000 ekor mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 yang hanya 8.000 ekor.
11. Produksi benih komoditas air payau dengan mutu terjamin tahun 2014 tercapai sebesar 30,4 juta ekor. Berbeda dengan tahun 2013 mencapai sebesar 31,45 juta ekor.
12. Sejak tahun 2013 BPBAP Ujung Batee mencoba mengembangkan jenis baru komoditas rumput laut yaitu Latoh/Lawi-Lawi (*Caulerpa* sp). Tahun 2104 dengan pemanfaatan tambak/kolam air payau yang ada di BPBAP Ujung Batee untuk melakukan produksi bibit rumput laut ini. Hingga akhir tahun 2014 telah tersedia 3 ton bibit rumput laut jenis Latoh/Lawi-Lawi.
13. Kawasan budidaya yang mendapatkan pengawasan/ pengendalian kualitas lingkungan di wilayah binaan pada tahun 2014 berjumlah 12 kawasan budidaya. Capaian jumlah kawasan binaan ini melampaui yang ditargetkan sebanyak 6 kawasan.

B. Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan merupakan langkah untuk menganalisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan perikanan budidaya.

1. Potensi

- Ketersediaan lahan untuk dikembangkan

Berdasarkan kajian Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, luas lahan potensial untuk budidaya ikan tercatat sekitar 12 juta hektar dengan rincian: 8,4 juta hektar untuk budidaya laut, di mana 3,8 juta ha merupakan potensi efektif yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan perikanan budidaya laut; 1,2 juta hektar untuk budidaya air payau dengan rincian 450.000 hektar telah dimanfaatkan dan 774.000 ha tersedia untuk dikembangkan, dan 2,2 juta hektar untuk budidaya air tawar.

Potensi lahan budidaya air tawar terdiri dari lahan budidaya kolam, sawah (mina padi) dan di perairan umum yang terdiri dari danau, rawa dan sungai. Untuk potensi lahan budidaya di kolam, dihitung berdasarkan asumsi luas lahan yang mendapat pasokan air irigasi teknis sebagai sumber airnya. Dengan memanfaatkan potensi sekitar 20% pasok air irigasi tersebut, diperkirakan luas potensi lahan untuk budidaya di kolam adalah sebesar 528.700 ha. Berdasarkan kajian Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2003, potensi lahan untuk pengembangan budidaya di kolam yang terluas adalah di pulau Jawa, yaitu propinsi Jawa Timur 92.400 ha, diikuti Jawa Barat 86.700 ha dan Jawa Tengah 83.200 ha. Di wilayah Sumatera, potensi lahan budidaya tawar yang terluas adalah NAD 29.000 ha, Sumatera Utara 31.800 ha dan Sumatera Barat 24.300 ha. Di Indonesia bagian Timur, potensi lahan untuk kolam yang terbesar adalah Sulawesi Selatan 34.800 ha.

Potensi lahan budidaya ikan di perairan umum, meliputi budidaya di danau, rawa dan sungai. Budidaya perikanan di perairan umum harus dilakukan secara ramah lingkungan, produktif, serta sesuai dengan penggunaan perairan umum untuk keperluan lainnya. Sedangkan potensi lahan budidaya di sawah atau lebih dikenal dengan sebutan budidaya mina padi, masih sangat besar dan belum sepenuhnya dimanfaatkan. Diperkirakan di seluruh Indonesia terdapat potensi sawah untuk pengembangan budidaya minapadi sekitar 1,5 juta ha.

- Tenaga kerja perikanan budidaya

Jumlah penduduk yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan merupakan potensi tenaga kerja perikanan budidaya, terlebih lagi penduduk yang tinggal di daerah pesisir. Sampai pada tahun 2014 terdapat 146.282 orang tenaga kerja baru bidang perikanan budidaya. Selain itu lebih dari 4 juta orang menggantungkan

hidup pada kegiatan perikanan budidaya. Jumlah tenaga kerja tersebut diprediksi akan terus bertambah seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan angkatan kerja.

Apabila jumlah penduduk yang besar dapat ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya mengenai perikanan budidaya, maka ini dapat secara langsung menunjang peningkatan produksi perikanan budidaya. Selain itu, peningkatan jumlah lulusan perguruan tinggi perikanan menunjukkan bahwa potensi tenaga kerja terdidik di bidang perikanan budidaya akan semakin tinggi.

- Teknologi perikanan budidaya

Banyak paket teknologi penelitian dan perekayasa di bidang perikanan budidaya yang dapat dimanfaatkan oleh pembudidaya ikan untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, dan produktivitas perikanan budidaya secara efisien. Berbagai spesies ikan komersial sudah berhasil di budidayakan seperti kerapu, kakap, ikan hias. Program *broodstock center* perikanan budidaya telah menghasilkan induk varietas unggul berbagai spesies dan benih berkualitas tinggi. Keberhasilan dalam produksi vaksin, probiotik dan immunostimulan untuk ikan/udang, diterbitkannya Standar Nasional Indonesia bidang perikanan budidaya, serta tersebarnya laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan utamanya untuk deteksi dini penyakit ikan yang dimiliki oleh pemerintah, swasta, maupun perguruan tinggi menambah optimis usaha di bidang perikanan budidaya akan terus tumbuh.

- Potensi pertumbuhan penduduk

Menurut publikasi Badan Pusat Statistik pada bulan Agustus 2010, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus adalah sebanyak 237,56 juta orang, dengan laju pertumbuhan penduduk sebanyak 1,49 persen per tahun. Jumlah penduduk yang sangat besar merupakan pasar dalam negeri yang potensial bagi produk perikanan khususnya perikanan budidaya. Pencapaian keberhasilan pembangunan ekonomi akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yang akan berimplikasi pada peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat, termasuk komoditas perikanan.

Masih rendahnya konsumsi masyarakat akan produk perikanan membuka peluang bagi peningkatan volume produksi dan diversifikasi produk perikanan di Indonesia. Namun hal tersebut harus diikuti dengan upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya makan ikan serta menjamin kualitas produk perikanan yang aman dikonsumsi sesuai dengan permintaan pasar.

Produk perikanan Indonesia juga berpotensi untuk dipasarkan ke pasar internasional seiring dengan pemberlakuan pasar bebas di era globalisasi. Terbukanya pasar luar negeri harus disertai dengan upaya pemenuhan persyaratan negara pengimpor terutama terkait dengan keamanan pangan. Perikanan

Budidaya terus dibangun dan dikembangkan dengan pola pikir industrialisasi, guna meningkatkan daya saing serta nilai tambah dalam menghadapi era pasar global, serta tuntutan pengelolaan sumberdaya perikanan yang lebih bertanggung jawab.

2. Permasalahan

Program peningkatan produksi perikanan budidaya yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 2010-2014 telah menunjukkan hasil yang nyata. Namun demikian, pembangunan perikanan budidaya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan budidaya. Permasalahanyang dihadapi dalam pembangunan perikanan budidaya sebagai berikut.

- Kerusakan lahan budidaya perikanan

pemanfaatan potensi lahan dan air dihadapkan pada permasalahan diantaranya adalah kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana alam seperti banjir, erosi dan tsunami yang sering mengakibatkan kerusakan lahan perikanan dan jaringan irigasi. Selain itu, lahan perikanan budidaya juga dihadapkan pada permasalahan tata ruang yang dimungkinkan terjadinya konflik kepentingan antar berbagai sektor. Terlebih lagi dari sisi status penguasaan lahan oleh sebagian pembudidaya ikan belum memiliki legalitas yang kuat dalam bentuk sertifikat.

Sub sektor perikanan budidaya merupakan suatu kegiatan yang sangat rentan terhadap adanya eksternalitas dari sektor lain, terutama terkait dengan pemanfaatan sumberdaya air. Pengurangan kualitas dan kuantitas air untuk kegiatan usaha perikanan budidaya adalah permasalahan yang sering muncul dari adanya konflik kepentingan pemanfaatan lahan. Pengurangan kualitas air berupa pencemaran perlu diwaspadai sebagai potensi berkurangnya jaminan keamanan pangan, dan lebih jauh lagi bahwa pencemaran dapat menyebabkan kematian pada komoditas yang dibudidayakan yang dapat berakibat terjadinya kegagalan panen.

Tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan lahan dan air perikanan budidaya ke depan adalah bagaimana meningkatkan koordinasi lintas sektor dan meningkatkan posisi tawar sektor perikanan budidaya. Selain itu, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jaringan irigasi.

- Kompetensi tenaga kerja perikanan belum maksimal

Kualitas sumberdaya manusia yang rendah menjadi kendala serius dalam pembangunan perikanan budidaya karena kegiatan perikanan budidaya berbasis di wilayah pedesaan yang rentan akan keterbatas akses pendidikan tinggi. Di sisi lain, anggota masyarakat pedesaan yang telah mengenyam pendidikan tinggi sering kali lebih tertarik bekerja dan berusaha di luar sektor perikanan karena belenggu kemiskinan di daerah pedesaan. Kondisi tersebut akan semakin parah

bila tidak ada kegiatan penyuluhan, bimbingan teknis dan pendampingan di lapang.

Tantangan ke depan sub sektor perikanan budidaya harus mampu memberikan jawaban terhadap kebutuhan peningkatan lapangan kerja melalui penguatan program dan kegiatan yang bersifat pro job. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan lebih aktif memperkenalkan usaha perikanan budidaya dan memberikan kesempatan yang lebih luas untuk pembudidaya pemula dan kaum wanita melalui stimulus bantuan sarana produksi. Selain itu, kegiatan penyuluhan, pendampingan dan bimbingan teknis untuk pembudidaya perlu terus ditingkatkan untuk menjamin keberhasilan dan meningkatkan keuntungan usaha budidaya.

- Pakan ikan yang berkualitas dengan harga murah masih langka

Permasalahan teknologi dalam pengembangan produksi perikanan budidaya diantaranya adalah belum optimalnya pengembangan formulasi pakan ikan yang berkualitas dengan harga murah. Padahal sebagian besar biaya produksi adalah untuk penggunaan pakan. Akibatnya sering kali margin keuntungan pembudidaya relatif kecil, utamanya pada kegiatan budidaya air tawar.

Tantangan ke depan yang adalah bagaimana mengembangkan teknologi produksi pakan ikan berkualitas dengan harga murah dan menjamin ketersediaan pakan untuk pembudidaya utamanya di pelosok desa. Ketersediaan teknologi yang tepat guna perlu disertai dengan upaya penyebaran teknologi tersebut kepada pelaku usaha perikanan budidaya. Peran serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan institusi penyuluh sangatlah penting dalam penyebaran informasi tersebut. Kegiatan diseminasi teknologi dan percontohan menjadi kegiatan penting sehingga perlu dikuatkan di masa yang akan datang.

- Pasar domestik untuk hasil perikanan masih kecil

Permasalahan yang dihadapi adalah dalam pengembangan pasar domestik untuk komoditas perikanan adalah masih rendahnya konsumsi ikan oleh masyarakat Indonesia. Data yang dirilis Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan, menunjukkan bahwa tingkat konsumsi ikan penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah sebesar 30,48 Kg/kapita/tahun. Tingkat konsumsi tersebut masih rendah dibanding negara lain seperti Malaysia (55,4 kg/kapita/tahun) dan Singapura (37,9 kg/kapita/pertahun).

Produk perikanan Indonesia juga berpeluang untuk dipasarkan ke pasar internasional seiring dengan pemberlakuan pasar bebas di era gloalisasi. Terbukanya pasar luar negeri harus disertai dengan upaya pemenuhan persyaratan negara pengimpor terutama terkait dengan keamanan pangan.

- Kemampuan mengakses kredit modal kerja masih rendah

Akses kredit modal kerja masih dihadapkan pada kendala yakni sebagian besar pembudidaya belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber permodalan/lembaga keuangan formal, diantaranya akibatnya oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan, khususnya yang terjadi pada pembudidaya ikan berskala kecil. Lahan budidaya juga sebagian besar belum memiliki sertifikat kepemilikan resmi sehingga tidak dapat dijadikan agunan. Di sisi lain, kelembagaan kelompok pembudidaya ikan yang belum solid serta tingkat pendidikan yang rendah juga merupakan faktor pembatas dalam menyusun proposal/rencana usaha dan mengelola administrasi keuangan yang merupakan pra syarat dalam pengajuan pinjaman ke perbankan.

Tantangan ke depan untuk mendorong keberpihakan pemerintah dan perbankan untuk memberikan kemudahan akses kredit program dan kredit komersial berbunga rendah yang disertai dengan upaya memperluas jaringan pelayanannya hingga ke pelosok pedesaan. Di samping itu, diperlukan upaya pendampingan dan penguatan kelembagaan usaha kelompok, peningkatan kemampuan dalam menyusun rencana usaha dan manajemen pengelolaan keuangan serta penumbuhan, pengembangan kelembagaan keuangan mikro dan pengembangan operasi pembudidaya di perdesaan.

INTERNAL	
STRENGTHS (KEKUATAN) / S	WEAKNESSES (KELEMAHAN) / W
- Luasnya ketersediaan lahan budidaya	- Kualitas dan kuantitas air berkurang
- Besarnya jumlah tenaga kerja bidang perikanan	- Kompetensi tenaga kerja tidak sesuai harapan
- Banyaknya paket teknologi di bidang perikanan budidaya	- Pakan berkualitas dengan harga murah sulit didapat
- Adanya program kredit usaha rakyat	- Konsumsi ikan oleh masyarakat masih rendah
PELUANG (OPPORTUNITIES) / O	THREATS (ANCAMAN) / T
- Tersebar nya sekolah/pelatihan perikanan di seluruh nusantara	- Bencana alam
- Tingginya permintaan akan pendampingan teknologi perikanan	- Konflik kepentingan berbagai sektor atas lahan budidaya
- Tingginya permintaan hasil perikanan dari luar negeri	- Kurangnya daya saing kualitas produk perikanan
- Semakin banyak lembaga keuangan mikro	- Sulitnya memenuhi persyaratan dan prosedur pengajuan kredit
EKSTERNAL	

Gambar 1: Analisis SWOT BPBAP Ujung Batee 2020-2024

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut: **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Sedangkan misi yang akan dilaksanakan KKP dalam untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

B. Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi di atas, BPBAP menetapkan tujuan pokok dalam kegiatannya yaitu:

1. Membina kawasan perikanan budidaya air payau dengan penerapan teknologi standar;
2. Mengembangkan rekayasa teknologi budidaya berbasis agribisnis dan melaksanakan alih teknologi kepada dunia usaha
3. Melakukan Diseminasi Teknologi budidaya air payau kepada masyarakat
4. Meningkatkan kapasitas pembudidaya air payau melalui pelatihan dan penyuluhan
5. Meningkatkan pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan

C. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya berdasarkan dibangun berdasarkan 3 perspektif, dengan 9 sasaran strategis, serta 23 indikator kinerja utama. Masing-masing indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 1) Nilai PNBP dari perikanan budidaya (Rp)
2. Pengelolaan kawasan perikanan budidaya yang berkelanjutan
 - 2) Jumlah percontohan pengelolaan kluster kawasan perikanan budidaya berkelanjutan (kawasan)
3. Peningkatan produksi perikanan budidaya lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 3) Jumlah tenaga teknis binaan (orang)
 - 4) Jumlah produksi induk unggul (ekor)
 - 5) Jumlah paket teknologi hasil perekayasaan (paket)
 - 6) Jumlah benih ikan bantuan ke masyarakat (ekor)
 - 7) Jumlah percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya di masyarakat (paket)
 - 8) Jumlah produksi pakan mandiri untuk bantuan dan operasional budidaya (kg)
4. Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan budidaya air payau wilayah kerja BPBAP Ujung Batee yang secara profesional dan partisipatif
 - 9) Jumlah layanan sampel yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang sesuai standar (sampel)
 - 10) Monitoring kawasan dan kesehatan budidaya ikan (kab/kota)
5. Terwujudnya tata kelola pemerintah lingkup BPBAP Ujung Batee yang efektif, efisien, dan berorientasi layanan prima
 - 11) Indeks profesionalisme ASN lingkup BPBAP Ujung Batee (%)
 - 12) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)
 - 13) Nilai rekon pengelolaan kinerja lingkup BPBAP Ujung Batee (%)
 - 14) Persentase pemenuhan rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPBAP Ujung Batee (%)
 - 15) Persentase penyelesaian LHP BPK atas BPBAP Ujung Batee (%)
 - 16) Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPBAP Ujung Batee (%)
 - 17) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPBAP Ujung Batee (%)

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perikanan Budidaya

Arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya
2. Meningkatkan daya saing dan potensi ekonomi sumberdaya perikanan budidaya
3. Meningkatkan kelestarian dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya.

Strategi pembangunan perikanan budidaya tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Memperkuat kemandirian kawasan dan pengelolaan sarana perikanan budidaya, dengan komponen kegiatan utama:
 - 1) Mengembangkan Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari) dengan mendorong kemandirian kelompok yang memproduksi pakan mandiri dan mengembangkan bahan baku pakan lokal serta penyediaan sarana produksi pakan;
 - 2) Mengembangkan industri perbenihan nasional untuk pemenuhan kebutuhan induk dan benih bermutu secara mandiri dengan mengoptimalkan fungsi UPT dan UPTD serta unit pembenihan masyarakat;
 - 3) Pengembangan kawasan perikanan budidaya (minapolitan) dengan mengintegrasikan rantai produksi dari hulu sampai hilir untuk efisiensi produksi;
 - 4) Pengembangan sarana input produksi inovatif (protein rekombinan, vaksin, enzim, probiotik, immunostimulan, rekayasa genetik, automatic feeder, karamba bulat dll.);
 - 5) Mendorong tumbuhnya industri penghasil sarana/peralatan/mesin perikanan budidaya di dalam negeri sesuai standar;
 - b. Memperkuat kemandirian kelompok dan kelembagaan usaha perikanan budidaya, dengan komponen kegiatan utama:
 - 1) Penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya dan pembenih ikan sehingga menjadi kelompok yang mandiri;
 - 2) Penguatan akses permodalan usaha pembudidaya ikan skala kecil serta peningkatan minat investasi pembudidaya skala besar;

- 3) Peningkatan kemitraan usaha perikanan budidaya/*Aquaculture incorporated*;
2. Meningkatkan daya saing dan potensi ekonomi sumberdaya perikanan budidaya, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Meningkatkan daya saing produk perikanan budidaya, dengan komponen kegiatan utama:
 - 1) Peningkatan kualitas induk dan benih melalui sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB);
 - 2) Pelaksanaan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
 - 3) Modernisasi sistem pembudidayaan ikan yang efektif dan efisien berbasis teknologi anjuran;
 - 4) Revitalisasi lahan marjinal dan ekstensifikasi;
 - 5) Peningkatan kapasitas prasarana (infrastruktur) perikanan budidaya yang efisien;
 - 6) Pengembangan Pos Pelayanan Kesehatan Ikan Terpadu (Posikandu) dalam rangka pencegahan (vaksinasi) dan *Early Warning System* penyakit di sentra-sentra produksi budidaya;
 - 7) Modernisasi sistem produksi pembudidayaan ikan mendukung industrialisasi;
 - 8) Pengembangan komoditas unggulan (*driven market commodity*);
 - 9) Segmentasi usaha perikanan budidaya.
 - b. Peningkatan potensi ekonomi perikanan budidaya
 - 1) Pengembangan industrialisasi marikultur secara intensif dan berkelanjutan;
 - 2) Peningkatan kuantitas dan kualitas ikan non konsumsi (ikan hias, karang buatan, tanaman hias dll);
 - 3) Pengembangan sentra budidaya baru dengan percontohan kawasan/klaster;
3. Pelestarian dan keberlanjutan sumberdaya perikanan budidaya, akan dilaksanakan melalui strategi penataan pengelolaan budidaya ikan berkelanjutan, dengan komponen kegiatan:
 - a. Penerapan teknologi budidaya yang efisien dan ramah lingkungan dan sesuai dengan daya dukung;
 - b. Pengembangan *Culture Based Fisheries (CBF)* dengan pendekatan komoditas *multi-trophic level*;
 - c. Penerapan IMTA (*Integrated Multi Trophic Aquaculture*);
 - d. Backyard Aquaculture (budidaya di pekarangan) dan pemanfaatan lahan marginal;
 - e. Pengembangan komoditas ikan spesifik lokal unggulan dan species ikan tahan perubahan lingkungan;
 - f. Pengembangan minapadi komoditas ekonomis (ugadi, ugamed, ugaladi).
 - g. Pengendalian plasma nutfah induk dan benih;
 - h. Rehabilitasi lingkungan sentra produksi perikanan budidaya (waduk, danau, lingkungan tambak/*silvo fisheries*).

Disamping arah kebijakan dan pelaksanaan strategi di atas, pada periode 2020-2024 Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya juga diberikan mandat untuk melaksana *quickwins* dan program lanjutan. *Quickwins* merupakan langkah inisiatif yang mudah dan cepat dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang dijalankan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Adapun rancangan program *quickwins* Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 2020-2024 difokuskan pada Membangun Gerakan Kemandirian Pembudidayaan Ikan melalui:

1. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) untuk 20.000 pembudidaya sampai tahun 2019.
2. Penjaminan mutu benih di Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan unit pembenihan lainnya pada 900 unit pembenihan sampai tahun 2019.
3. Pengembangan 100 Kebun Bibit rumput laut dengan kultur jaringan sampai tahun 2019.
4. Penerapan teknologi biofloc budidaya lele dan patin di 24 lokasi sampai tahun 2019.

Sedangkan rancangan program lanjutan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang dimandatkan pada periode 2020-2024 adalah Pengembangan budidaya laut di Keramba jaring Apung (KJA), pengembangan pakan mandiri, pengembangan sarana prasarana perikanan budidaya.

B. Arah Kebijakan dan Strategi BPBAP Ujung Batee

Arah kebijakan BPBAP Ujung Batee tahun 2020-2024 dalam rangka Pembangunan Perikanan Budidaya, sebagai berikut:

1. Terkelolanya Sistem Perbenihan Ikan

Kondisi yang ingin dicapai dengan terkelolanya sistem perbenihan ikan adalah terpenuhinya kebutuhan benih untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin. Adapun strategi yang dilakukan untuk menjaga terkelolanya sistem perbenihan ikan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan percepatan induk unggul, dengan langkah strategis melalui penguatan sarana dan prasarana induk unggul, pelaksanaan pengembangan dan operasionalisasi *broodstock center*, penguatan jejaring pemuliaan induk ikan;
- b. pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi pembenihan, dengan langkah strategis melalui pembinaan mutu perbenihan, pelaksanaan pembinaan dan sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), penyusunan standarisasi perbenihan;

- c. pengembangan unit perbenihan skala besar, dengan langkah strategis melalui operasionalisasi unit perbenihan skala besar, pembinaan dan pemantauan perbenihan, penguatan koordinasi dengan UPTD, pengembangan dan operasionalisasi unit perbenihan pemerintah;
- d. pengembangan dan pemberdayaan unit perbenihan skala kecil, dengan langkah strategis melalui peningkatan kinerja kelompok UPR dan HSRT, diseminasi perbenihan skala kecil, penguatan kelembagaan perbenihan skala kecil;
- e. pengembangan informasi dan distribusi perbenihan, dengan langkah strategis melalui penyajian informasi dan distribusi perbenihan, pengumpulan dan pengelolaan data

2. Terkelolanya Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan

Kondisi yang ingin dicapai dengan terkelolanya sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan adalah terpenuhinya kebutuhan lahan budidaya yang sehat, terjaganya kondisi lingkungan yang optimal dan menghasilkan produk perikanan budidaya yang aman dikonsumsi. Adapun strategi yang dilakukan untuk menjaga terkelolanya sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan sebagai berikut:

- a. penguatan kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, dengan langkah strategis melalui penyusunan pedoman standar laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas laboratorium, pembinaan dan pengembangan laboratorium serta pengembangan jejaring laboratorium;
- b. pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit ikan, dengan langkah strategis melalui penyusunan pedoman pengendalian hama dan penyakit ikan, monitoring dan pembinaan pengendalian penyakit ikan, pengembangan dan aplikasi vaksin dan probiotik;
- c. pelaksanaan perlindungan lingkungan pembudidayaan ikan, dengan langkah strategis melalui pengelolaan rehabilitasi lingkungan dengan kontrol biologi, monitoring dan evaluasi pengelolaan;
- d. pelaksanaan pengendalian residu, dengan langkah strategis melalui pengujian sampel dalam rangka monitoring residu;
- e. pelaksanaan pengendalian obat ikan, bahan kimia, dan bahan biologi untuk pembudidayaan ikan, dengan langkah strategis melalui sosialisasi peraturan
- f. pelaksanaan standarisasi kesehatan ikan dan lingkungan, dengan langkah strategis melalui pengusulan RSNi bidang kesehatan ikan dan lingkungan.

3. Terkelolanya Sistem Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan

Kondisi yang ingin dicapai dengan terkelolanya sistem produksi pembudidayaan ikan adalah terpenuhinya kebutuhan pakan dengan pakan mandiri, unit usaha budidaya yang tersertifikasi dan tersedianya data statistik perikanan budidaya yang

akurat dan mutakhir. Adapun strategi yang dilakukan untuk menjaga terkelolanya sistem produksi pembudidayaan ikan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), dengan langkah strategis melalui penilaian, pengawasan, monitoring dan evaluasi sertifikasi CBIB;
- b. pengembangan produksi budidaya air payau, dengan langkah strategis melalui pembinaan penerapan SNI dan CBIB budidaya ikan payau; temu lapang perikanan budidaya; supervisi, pembinaan, monitoring dan evaluasi kawasan dan percontohan perikanan budidaya;
- c. pengumpulan data dan statistik perikanan budidaya, dengan langkah strategis melalui koordinasi, pengumpulan, dan pengolahan data (validasi data statistik perikanan budidaya); penyajian dan publikasi data;
- d. pengembangan dan pembinaan kewirausahaan perikanan budidaya, dengan langkah strategis melalui pembinaan wirausaha perikanan budidaya pemula terdidik, pengembangan model usaha perikanan budidaya, temu kemitraan usaha perikanan budidaya, pengembangan model usaha berbasis kelompok;
- e. pengembangan pelayanan usaha, dengan langkah strategis melalui identifikasi kelayakan usaha, pembinaan pelayanan usaha, sosialisasi peraturan perizinan usaha perikanan budidaya;
- f. pengembangan informasi usaha dan promosi, dengan langkah strategis melalui penyajian informasi usaha, pengembangan promosi usaha perikanan budidaya;

4. Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan

Kondisi yang ingin dicapai dengan terkelolanya sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan adalah tersedianya kawasan atau sentra produksi perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana yang memadai. Adapun strategi yang dilakukan untuk menjaga terkelolanya sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan sebagai berikut:

- a. pengembangan lahan dan air pembudidayaan ikan, dengan langkah strategis melalui penilaian kesesuaian lahan, pemanfaatan lahan terlantar untuk perikanan budidaya, pengembangan potensi lahan budidaya;
- b. pengembangan prasarana dan sarana budidaya air payau, dengan langkah strategis melalui pengembangan prasarana dan sarana budidaya air payau, pengusulan pengembangan standar (RSNI-3) prasarana dan sarana budidaya air payau;
- c. pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya, dengan langkah strategis melalui pendampingan pelaksanaan minapolitan perikanan budidaya, koordinasi lintas sektor pendampingan kawasan minapolitan.

5. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kondisi yang ingin dicapai dengan meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya adalah pengelolaan keuangan dan aset Satker lingkup BPBAP Ujung Batee menuju KKP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan penataan organisasi. Adapun strategi yang dilakukan untuk menjaga meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebagai berikut:

- a. penyelesaian dokumen perencanaan, monitoring evaluasi dan kerjasama program, dengan langkah strategis melalui: penyusunan program/kegiatan pembangunan perikanan budidaya, penyusunan rencana kerja dan anggaran, rencana teknis perencanaan pembangunan perikanan budidaya, pelaksanaan pengembangan kerjasama, penyusunan laporan tahunan, penyusunan LAKIP, temu koordinasi program/kegiatan pembangunan perikanan budidaya;
- b. pengembangan dan pembinaan kepegawaian, dengan langkah strategis melalui penyelesaian administrasi perencanaan dan pengembangan kepegawaian, penyelesaian administrasi mutasi pegawai dan pensiun, tata usaha kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional;
- c. pengembangan pelaksanaan hubungan masyarakat, dengan langkah strategis melalui penyelenggaraan kehumasan, pameran dan promosi perikanan budidaya, pengelolaan perpustakaan;
- d. penyelesaian dokumen/laporan keuangan dan umum, dengan langkah strategis melalui penyelesaian laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan, inventarisasi aset.

6. Terkelolanya Pakan dan Obat Ikan

Kondisi yang ingin dicapai dengan terkelolanya pakan adalah terpenuhinya kebutuhan pakan dengan pakan mandiri, unit usaha budidaya yang mempunyai produksi pakan mandiri dan tersedianya data statistik perikanan budidaya yang akurat dan mutakhir.

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran BPBAP Ujung Batee dalam mencapai sasaran strategis. Selain itu regulasi tersebut dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perikanan budidaya.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai. Perubahan dan penyusunan regulasi disesuaikan dengan tantangan global, regional dan nasional. Kerangka regulasi diarahkan untuk:

1. penyediaan regulasi dari turunan Undang-Undang yang terkait dengan pembangunan perikanan budidaya;

2. meningkatkan pemerataan sumber daya manusia bidang perikanan budidaya;
3. pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan;
4. peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam perikanan budidaya;
5. penguatan kemandirian pakan;
6. penyelenggaraan jaminan benih yang lebih bermutu;
7. penguatan peran perekayasaan teknologi; dan
8. peningkatan pendampingan teknologi budidaya.

Kerangka regulasi yang akan disusun antara lain adalah perumusan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri yang terkait, termasuk dalam rangka menciptakan sinkronisasi, integrasi penyelenggaraan pembangunan perikanan budidaya antara pusat dan daerah.

Beberapa regulasi yang dibutuhkan dalam pembangunan perikanan budidaya terutama budidaya air payau, sebagai berikut:

1. regulasi di bidang lahan: mempercepat penerbitan Perda Provinsi/ Kab/Kota dan menyempurnakan Perda sesuai UU 41/2009;
2. regulasi sarana perikanan: perbaikan subsidi pakan dan subsidi benih; pengembangan sistem perbenihan;
3. regulasi pembiayaan pertanian: mempercepat dan mempermudah persyaratan akses petani pada skim kredit;
4. regulasi perlindungan petani perikanan : implementasi UU 19/2013 asuransi usahatani
5. regulasi di bidang ekspor perikanan dan impor produk perikanan;
6. regulasi kemudahan investasi di sektor pertanian.

D. Kerangka Kelembagaan

Desain organisasi yang dibentuk memperhatikan mandat konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, perkembangan dan tantangan lingkungan strategis di bidang pembangunan perikanan budidaya, pergeseran dalam wacana pengelolaan pemerintahan (*governance issues*), kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, dan prinsip reformasi birokrasi (penataan kelembagaan yang efektif dan efisien).

Fungsi pemerintahan yang paling mendasar adalah melayani kepentingan rakyat. BPBAP Ujung Batee diharapkan menjadi organisasi yang efektif melalui desain organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*), menghilangkan tumpang tindih tugas dan fungsi dengan adanya kejelasan peran, tanggung jawab dan mekanisme koordinasi (secara horisontal dan vertikal) dalam menjalankan program-program Renstra 2020-2024.

Kerangka kelembagaan terdiri dari: 1) sinkronisasi nomenklatur kelembagaan dengan program BPBAP Ujung Batee; 2) penguatan kebijakan untuk mendukung

pembangunan perikanan budidaya; 3) penguatan pemantauan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan perikanan budidaya; 4) penguatan bisnis internal BPBAP Ujung Batee yang meliputi pembenahan SDM, pembenahan manajemen; 5) penguatan peningkatan pendampingan masyarakat dan mutu pelayanan; 6) penguatan sinergitas pembangunan perikanan budidaya; dan 7) penguatan program prioritas pembangunan perikanan budidaya.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budidaya tahun 2020-2024, diperlukan penguatan kelembagaan antara lain sebagai berikut:

1. Kelembagaan kelompok usaha perikanan budidaya, termasuk unit pembenihan skala kecil, menjadi kelompok yang berbadan hukum sehingga dapat lebih mudah mengakses permodalan terutama dari perbankan serta memperkuat daya saing usaha perikanan budidaya.
2. Dalam rangka percepatan pelaksanaan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) diperlukan dukungan kelembagaan di daerah yang didelegasikan untuk melakukan kegiatan sertifikasi.
3. Untuk mendorong gerakan pengembangan pakan ikan mandiri berbahan baku lokal, diperlukan dukungan kelembagaan yang lebih kuat di BPBAP Ujung Batee untuk melakukan koordinasi lintas sektor sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.
4. Kelembagaan unit pembenihan skala besar di daerah yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota perlu diperkuat kelembagaannya.

BPBAP Ujung Batee dalam mewujudkan program pembangunan perikanan budidaya 2020-2024 sesuai dengan visi dan misi, maka arah penyusunan kelembagaan seperti pada tugas, fungsi dan susunan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Perikanan Budidaya Air Payau, dan Perikanan Budidaya Laut, tugas BPBAP Ujung Batee Provinsi Aceh adalah "melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, serta bimbingan teknis perikanan budidaya air payau". Dalam melaksanakan tugas tersebut BPBAP Ujung Batee menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kegiatan teknis dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta laporan;
2. pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya air payau;
3. pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi perikanan budidaya air payau;
4. pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya air payau;
5. pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budidaya air payau;
6. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya air payau;

7. pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya air payau;
8. pelaksanaan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya air payau;
9. pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya air payau;
10. pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya air payau; dan
11. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Susunan organisasi BPBAP Ujung Batee terdiri atas: a) Seksi Uji Terap Teknik dan Kerja Sama; b) Seksi Pengujian dan Dukungan Teknis; c) Subbagian Tata Usaha; dan d) Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 3. Struktur Organisasi BPBAP Ujung Batee

Seksi Uji Terap Teknik dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan uji terap teknik, standardisasi, sertifikasi, kerja sama teknis, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta publikasi perikanan budidaya air payau.

Seksi Pengujian dan Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis, kesehatan ikan dan lingkungan, produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi, serta bimbingan teknis perikanan budidaya air payau.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaporan keuangan,

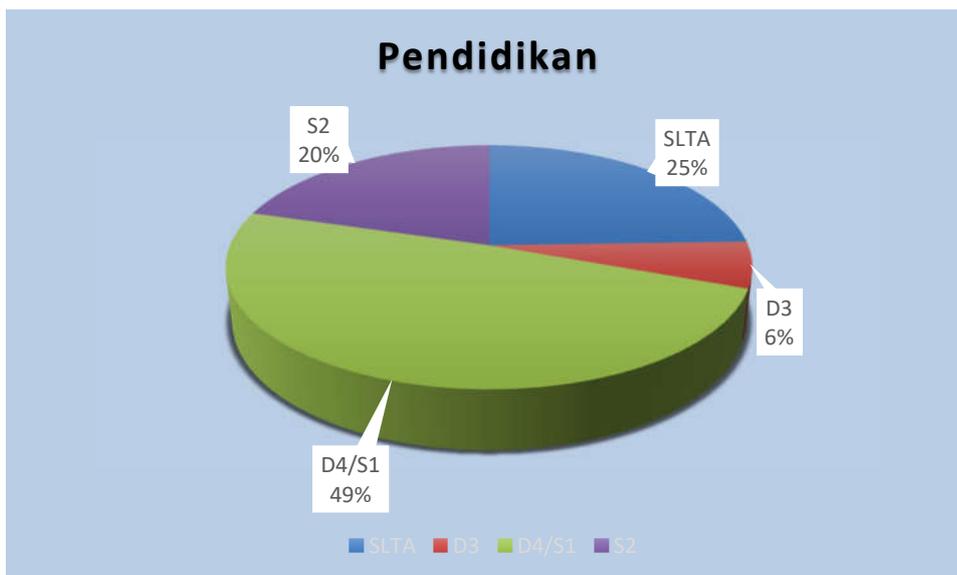
kegiatan teknis, anggaran, pengelolaan kepegawaian, tata laksana, barang milik negara, rumah tangga, dan ketatausahaan.

Total keseluruhan pegawai BPBAP Ujung Batee sebanyak 79 orang, dengan rincian status PNS sebanyak 49 orang dan non PNS sebanyak 30 orang. Pegawai yang berstatus PNS didominasi oleh fungsional tertentu (perekayasa, pengawas perikanan, pengendali hama dan penyakit ikan, dan teknisi litkayasa) sebanyak 26 orang, sementara fungsional umum (pelaksana administrasi dan pelaksana teknis) hanya sebanyak 20 orang, dan pejabat struktural 3 orang (Kepala Seksi Uji Terap Teknik dan Kerjasama dijabat oleh Pelaksana Tugas/PLT).

Tabel 1. Sumberdaya Manusia Status PNS Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Nama/Jenjang Jabatan	Jumlah (orang)
1	Struktural	1 Kepala Balai	1
		2 Kepala Seksi Uji Terap Teknik dan Kerjasama	1
		3 Kepala Seksi Pengujian dan Dukungan Teknis	1
		4 Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
2	Fungsional	1 Perekayasa Muda	6
		2 Perakayasa Pertama	2
		3 Pengawas Perikanan Muda	6
		4 Pengawas Perikanan Pertama	1
		5 Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan	2
		6 PHPI Muda	2
		7 PHPI Pertama	1
		8 PHPI Pelaksana Lanjutan	1
		9 Teknisi Litkayasa Pelaksana Lanjutan	2
		10 Teknisi Litkayasa Pelaksana	3
3	Pelaksana	1 Teknisi Listrik dan Jaringan	1
		2 Teknisi Mesin	1
		3 Teknisi Instalasi Budidaya	7
		4 Pengelola Laboratorium	1
		5 Pengadministrasi Persuratan	1
		6 Analis Tata Usaha	1
		7 Pengadministrasi Keuangan	4
		8 Pengelola Barang Milik Negara	2
Jumlah			49

Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan, komposisi sumber daya manusia BPBAP Ujung Batee adalah sebagai berikut: (i) S2 sejumlah 10 orang (20%); (ii) S1/D4 sejumlah 24 orang (49%); (iii) D3 sejumlah 3 orang (6%); dan (iv) SLTA sejumlah 12 orang (25%).



Gambar 1. Pegawai BPBAP Ujung Batee berdasarkan tingkat pendidikan

Berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) tahun 2019, diketahui formasi untuk setiap jabatan (rincian terlampir), sehingga kekurangan pegawai sebagai usulan alokasi formasi penerimaan CPNS tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian usulan alokasi formasi CPNS tahun 2020

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan		Gol. Ruang	Jumlah Alokasi
1	Analisis Keuangan	S1	Akuntansi	III/a	1
2	Analisis Laboratorium	S1	Nutrisi dan Teknologi Pakan	III/a	1
3	Teknisi Instalasi Budidaya	SUPM/SMK	Budidaya Perikanan	II/a	2
4	Teknisi Mesin	DIV	Permesinan Perikanan	III/a	1
5	Pengelola Informasi dan Publikasi	D3	Sistem Informasi	II/c	1
6	Tek. Litkayasa Pelaksana Pemula	SUPM/SMK	Budidaya Perikanan	II/a	3
7	PHPI Pertama	S1+drh	Kedokteran Hewan	III/b	1
		S1	Mikrobiologi	III/a	1

Untuk pengembangan kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugasnya diperlukan pengembangan pengetahuan melalui tugas belajar dan izin belajar. BPBAP Ujung Batee merencanakan kebutuhan tugas/izin belajar tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 4. Rencana kebutuhan tugas belajar

Bidang Pekerjaan	Jenjang	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Perekayasaan	S2	1	1			1
	S3			1		1
Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	S2				1	
	S3			1		
Pengawasan Perikanan	S2		1			
	S3				1	
Jumlah		1	2	2	2	2

Tabel 5. Rencana kebutuhan izin belajar

Bidang Pekerjaan	Jenjang	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Administrasi	S2					
Litkayasa	D4/S1		1		1	
Perekayasaan	S2	2		1		1
Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	S2					
Pengawasan Perikanan	S2	1		1		1
Jumlah		3	1	1	1	2

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Memperhatikan rancangan awal RPJM 2020-2024, visi dan misi, tujuan, strategi dan sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka disusunlah target kinerja dan kerangka pendanaan program-program 2020-2024. Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun.

Untuk mengukur dan mengevaluasi hasil pembangunan perikanan budidaya selama periode 2020-2024, BPBAP Ujung Batee telah merumuskan dan menetapkan target indikator dan sasaran strategis 2020-2024, sebagai target kondisi yang ingin dicapai secara nyata serta mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*), dari satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan BPBAP Ujung Batee.

Tabel 6 : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Periode 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat lingkup BPBAP Ujung Batee					
	1) Nilai PNBPN dari perikanan budidaya (Rp 000)	1.034.278	1.167.145	1.251.476	1.376.624	1.514.286
2	Pengelolaan kawasan perikanan budidaya yang berkelanjutan					
	2) Percontohan pengelolaan kluster kawasan perikanan budidaya berkelanjutan (kawasan)	1	2	1	1	1
3	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana UPT					
	3) UPT perikanan budidaya yang ditingkatkan fasilitasnya (unit)		1	1	1	1
4	Pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan					
	4) Sarana produksi usaha perikanan budidaya yang didistribusikan ke masyarakat (kelompok)	7	17	15	15	15

No	Sasaran Strategis	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	5) Prasarana produksi dan usaha yang dikembangkan (unit)		1	1	1	1
	6) Benih yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	7.110.000	7.683.315	8.000.000	9.000.000	10.000.000
	7) Calon induk unggul yang disalurkan ke masyarakat (ekor)		14.820	15.000	15.000	15.000
	8) Calon induk unggul yang diproduksi (ekor)	49.400	64.100	65.000	67.000	70.000
	9) Pakan ikan yang disalurkan ke masyarakat (kg)	100.000	70.000	72.000	75.000	77.000
	10) Pakan ikan yang diproduksi untuk operasional UPT (kg)		37.000	37.000	37.000	37.000
	11) Rehabilitasi sarana dan prasarana UPR/HSRT (unit)		3	3	3	3
	12) Sarana teknologi yg diproduksi oleh UPT (paket)	1	4	4	4	4
	13) Layanan Diseminasi Teknologi PB (layanan)		5	5	5	5
4	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan budidaya yang partisipatif					
	14) Jumlah layanan sampel yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang sesuai standar (sampel)	3.350	3.350	3.450	3.550	3.650
5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPBAP Ujung Batee					
	15) Indeks profesionalisme ASN lingkup BPBAP Ujung Batee (%)	72	73	74	75	76
	16) Penyelesaian LHP BPK atas BPBAP Ujung Batee (%)	100	100	100	100	100
	17) Nilai rekon pengelolaan kinerja BPBAP Ujung Batee (%)	85	90	92	94	96
	18) Rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPBAP Ujung Batee yang dokumen tindak lanjutnya telah tuntas (%)	60	65	70	75	85

No	Sasaran Strategis	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	19) Prosentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	85	87	90
	20) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPBAP Ujung Batee (%)	88	89	90	91	92
	21) Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPBAP Ujung Batee (%)	85	86	87	88	89
	22) Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa (%)		72,5	75	75	75
	23) Tingkat pengelolaan barang milik negara (%)		72,5	75	75	75

B. Kerangka Pendanaan

Upaya mencapai tujuan BPBAP Ujung Batee dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan sumber daya dapat berasal dari aparatur yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPBAP Ujung Batee periode 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 7 : Indikasi Kebutuhan Pendanaan BPBAP Ujung Batee Periode 2020-2024

Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan (dalam Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	30.950				
1. Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan	8.605				
2. Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	8.675				
3. Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	1.400				
4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	11.335				
5. Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan	934				

Tabel 8 : Indikasi Kebutuhan Pendanaan BPBAP Ujung Batee Periode 2021-2024 (redesain)

Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan (dalam Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		41.939	41.939	41.939	41.939
1. Pengelolaan Perbenihan Ikan		11.080	11.080	11.080	11.080
2. Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan		23.908	23.908	23.908	23.908
3. Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan		4.325	4.325	4.325	4.325
4. Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan		2.625	2.625	2.625	2.625
Program Dukungan Manajemen		11.603	11.603	11.603	11.603
1. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya		11.603	11.603	11.603	11.603
TOTAL ALOKASI		53.542	53.542	53.542	53.542

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Rencana Strategis BPBAP Ujung Batee periode 2020-2024 merupakan upaya untuk mewujudkan visi dan misi BPBAP Ujung Batee, yang merupakan pernyataan tujuan jangka menengah dan menjadi acuan dalam menyusun program/kegiatan jangka pendek. Pengalokasian kegiatan dan sumber-sumber biayanya dapat dipersiapkan dan ditetapkan secara terencana melalui Penetapan Kinerja dan Rencanan Kinerja. Rencana Strategis ini bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

B. Monev dan Pelaporan

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan merupakan upaya untuk menjawab dan memenuhi tantangan dan kebutuhan dalam rangka melaksanakan siklus manajemen pembangunan secara utuh. Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang handal akan memberikan kontribusi nyata guna berjalannya siklus umpan balik pada tahap perencanaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Sistem monev kinerja pembangunan, khususnya terhadap program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan, perlu terus dikembangkan agar lebih bermanfaat bagi manajemen pembangunan. Dengan berkembangnya jumlah kegiatan, maka diperlukan suatu sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan dapat menjadi database untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perikanan budidaya meliputi (i) monitoring, (ii) evaluasi dan (iv) pelaporan.

1. Monitoring merupakan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan apakah input atau sumberdaya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact* yang diharapkan. Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Oleh karenanya monitoring dapat dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung (*on-going project*) dan pada saat kegiatan sudah operasional.

2. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah pengelolaan suatu kegiatan telah dilaksanakan secara benar sesuai rencana, norma serta ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dari hasil monitoring tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai umpan balik bagi pimpinan untuk mengambil keputusan sebagai tindak lanjutnya antara lain adalah (i) perbaikan kegiatan yang sedang berjalan; (ii) pemecahan masalah yang dihadapi; dan (iii) perbaikan rencana yang akan datang. Evaluasi yang dilakukan dapat dilakukan pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan serta tahap pasca pelaksanaan yang dilakukan secara berkala.
3. Pelaporan hasil kegiatan pembangunan perikanan budidaya merupakan salah satu media penyampaian informasi terhadap serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak dari persiapan kegiatan sampai pada akhir pelaksanaan. Melalui laporan yang baik akan dapat dilihat sejauhmana perkembangan pelaksanaan, hasil pelaksanaan dan tingkat keberhasilannya sehingga memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan. Di dalam pelaksanaannya, kegiatan pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang.